BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Mojokerto bekerja sama dengan Pemerintah Kota Mojokerto dan berbagai pihak terhadap aset yang dimiliki berupa Pasar Benteng Pancasila. Pemerintah Kota Mojokerto melakukan pengelolaan secara baik guna mencapai target penerimaan daerah. Berdasarkan pada uraian pengelolaan yang dilakukan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut

- 1) Pasar Benteng Pancasila dibangun dengan adanya latar belakang penataan tata kota yang lebih indah serta terstruktur, PKL yang ada di Kota Mojokerto sering menimbulkan kemacetan di beberapa jalan dan kurang adanya penataan yang lebih terintegrasi bagi para pedagang. Adanya penambahan berbagai sarana dan prasarana baru seperti toilet, ruang menyusui, tempat ibadah, hingga adanya *Wi-Fi* yang akan dapat diakses di area Pasar Benteng Pancasila diharapkan pengunjung dapat lebih nyaman melakukan aktivitas perbelanjaan dengan aman dan nyaman.
- 2) Mitra pedagang yang akan menempati Pasar Benteng Pancasila dilakukan penunjukan secara langsung untuk menempati pasar benteng atau juga bisa

disebut melakukan relokasi atau pemindahan tempat yang bertujuan untuk melakukan penertiban, pembinaan, dan penataan yang bertujuan membuat tata kota lebih baik. Tidak ada proses lelang maupun penawaran yang dilakukan dalam pengelolaannya.

- 3) Pengoptimalan aset daerah Pasar Benteng Pancasila menggunakan ketentuan retribusi daerah dengan kategori retribusi jasa umum dengan penarikan/iuran retribusi secara harian. Pada tahun 2020 dilakukan pembukaan ulang secara resmi oleh Walikota Mojokerto dengan jumlah kios sebanyak 242 dari 242 kios hal ini menandakan tidak ada aset yang *idle* atau tidak termanfaatkan karena seluruh kios terisi. Pada saat pandemi Covid-19 diupayakan agar para pedagang tidak sampai gulung tikar/menutup toko karena situasi pandemi. Sehingga pemerintah tidak melakukan penarikan retribusi pada saat pandemi, dengan harapan dapat meringankan beban para pemilik toko dan membantu perekonomian masyarakat.
- 4) Pada Pasar Benteng Pancasila tidak ditemukan adanya permasalahan terkait sarana, prasarana, maupun terkait besaran retribusi yang diterapkan menurut peraturan daerah. Namun sejak adanya pandemi covid-19 terjadi permasalahan sehingga Walikota Mojokerto mengeluarkan surat edaran berupa Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pengurangan Tarif Retribusi Daerah Karena Dampak *Corona Virus Disease* 2019. Dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 33 Tahun 2020 memberikan pengurangan tarif retribusi daerah sebesar 20%. Pasar

Benteng Pancasila termasuk salah satu pasar yang digratiskan terkait penarikan retribusi sepanjang berlakunya PPKM namun aturannya tidak tertulis.

4.2 Saran

Pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku masih terdapat ketidaksesuaian didalam implementasi seperti masih adanya surat tanpa nomor surat yang terera, pengamanan yang kurang baik terkait dokumen yang ada, dan inventarisasi yang kurang memadai. Diharapkan kedepannya dapat memperbaiki dan melakukan inventarisasi dokumen dengan baik karena hal tersebut termasuk dalam bentuk pengamanan aset.